

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menempati posisi keempat dunia dengan presentase jumlah penduduk yang tinggi. Penduduk merupakan sekelompok orang yang saling berkelompok dan bermukim di suatu wilayah tertentu. Penduduk suatu asset yang penting bagi berkelangsungan suatu negara, maka penduduk ini menjadi suatu unsur yang penting dalam berdirinya suatu negara. Saat ini laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah yang harus segera diselesaikan terutama untuk negara-negara berkembang terkhususnya di Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting untuk segera mengendalikan laju pertumbuhan di Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat (Hakim, 2023).

Permasalahan kependudukan menjadi suatu hal umum yang harus dituntaskan segera oleh pemerintah, mengingat peran serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek yang cukup besar. Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus membuat inovasi-inovasi program yang berguna serta cukup efektif untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek yang berdampak cukup signifikan dalam kehidupan bernegara. Salah satunya mempengaruhi kualitas hidup terhadap fungsi pembangunan nasional serta kondisi ekonomi masyarakat setempat (Saputra, 2019).

Upaya pemerintah Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya dengan telah menerapkan program kampung keluarga berkualitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. Program ini dilaksanakan guna meningkatkan kualitas penduduk dengan adanya berbagai kegiatan rutin berbasis pemberdayaan, dengan cara memaksimalkan

peningkatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat terkhususnya dalam aspek peningkatan kualitas kesehatan hingga kondisi sosial ekonomi. Upaya untuk terus memaksimalkan pelaksanaan program Keluarga Berkualitas tentu menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah saat ini. Dimana dalam pelaksanaannya, program ini dipercayakan kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan sebuah lembaga non kementerian. BKKBN sendiri merupakan sebuah lembaga resmi sebagai pelaksana teknis program dimana dalam pelaksanaan kegiatannya terstruktur dan terkoordinasi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berada di kecamatan dan desa (Syawal, 2019).

Menurut UU No.52 Tahun 2009, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ini menekankan bahwa wewenang BKKBN tidak hanya terbatas pada pembangunan kampung keluarga berkualitas, tetapi juga mencakup pengendalian penduduk. Program ini merupakan sebagai langkah dari BKKBN dalam melaksanakan agenda prioritas yaitu Nawacita ke 3, 4 dan 5 untuk mewujudkan suatu kampung Keluarga Berkualitas. Dengan pelaksanaan agenda prioritas ini sehingga dapat membangun Indonesia dimulai dari pinggiran, yaitu dengan memperkuat daerah-daerah terkhususnya desa dalam suatu kerangka Negara Kesatuan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melakukan peningkatan karakter masyarakat dengan adanya kebijakan penataan kurikulum pendidikan, penguatan program Kependudukan serta Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Kampung Keluarga Berkualitas dimulai dari jenjang desa/kelurahan yang terintegrasi dalam rangka pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pada mulanya dalam pembentukan program Kampung KB ini

merupakan Kampung Keluarga Berencana, namun setelah terbitnya surat edaran dari Mendagri mengenai Kampung Keluarga Berkualitas maka dirubahlah nama yang dulunya Kampung Keluarga Berencana dirubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung keluarga berkualitas ini merupakan sebuah model percepatan pembangunan keluarga yang terhubung melalui pendekatan individu, keluarga dan masyarakat. Dengan adanya kampung KB ini diharapkan dapat menghasilkan keluarga Indonesia sebagai keluarga berkualitas, mandiri, bahagia dan tentram serta memiliki kontribusi pada pembangunan negara (Timisela, 2023).

Kampung Keluarga Berkualitas yang merupakan suatu satuan wilayah yang setingkat Desa serta memiliki kriteria tertentu dimana dalam satuan wilayah ini terdapat keterpaduan program pembangunan antara program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta terkait dengan pembangunan sektor dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Kampung keluarga berkualitas tidak hanya untuk memperlambat roda laju pertumbuhan penduduk, dengan adanya program ini diharapkan dapat menanggulangi masalah seperti penurunan angka kematian ibu hamil atau ibu melahirkan dan kematian bayi hingga menurunkan angka kemiskinan. Program kampung keluarga berkualitas digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembinaan karakter bangsa yang dimulai dari sebuah keluarga. Kegiatan dalam kampung keluarga berkualitas berisi kegiatan-kegiatan lintas sektor dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan ketahanan keluarga seperti pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Selain itu, program lain yang dijalankan yaitu peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui delapan fungsi keluarga serta adanya Rumah Dataku yaitu rumah data kependudukan Kampung Keluarga Berkualitas (Syabani, 2021).

Dalam Inpres No. 3 Tahun 2022 yang menginstruksikan agar kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dapat terlaksana lebih optimal sehingga kualitas keluarga dan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi gerakan bersama setingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam penyelenggaraan dan penguatan institusi keluarga dengan semua dimensinya. Dibentuknya Kampung Keluarga Berkualitas, secara umum memiliki tujuan agar terjadinya peningkatan kualitas hidup manusia ditingkat desa atau yang setara dan pembangunan sektor terkait dengan tujuan memujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Secara khusus, Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembangunan yang berlandaskan pada wawasan kependudukan, yang bukan hanya akan memaksimalkan peran serta pemerintah, tetapi juga lembaga non Kementerian dan swasta dalam memfasilitasi, memberi pendampingan serta membina masyarakat untuk penyelenggaraan program (Fitriyani, 2023).

Kampung Keluarga Berkualitas menjadi sebuah inovasi yang dinilai cukup strategis yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemberdayaan serta mengedukasi masyarakat secara nyata di lapangan. Hal ini dikarenakan Kampung Keluarga Berkualitas memang dirancang sebagai sebuah miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu program ini bersifat sebagai suatu pendekatan pembangunan yang universal sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorongnya penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan.

Berdasarkan temuan dari jurnal Alfano & Hasyim (2023) menemukan bahwasannya pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka pencegahan stunting di Kota Pangkalpinang berjalan dengan baik, tetapi dalam

pelaksanaanya masih mengalami beberapa kendala seperti tidak kesesuaiannya Dapur Sehat atasi Stunting dengan yang diharapkan, dimana pelaksanaanya sejauh ini hanya sebatas penyebaran informasi mengenai menu untuk balita yang beresiko stunting. Sejalan dengan temuan tersebut Apriyanto (2023) juga mengemukakan bahwasannya Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan dengan menggunakan teori dari George Edward III sejauh ini sudah berjalan dengan baik tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut dapat diatasi dengan, pemerintah melakukan koordinasi dengan OPD lain yang teribat dari lintas sektor untuk menguatkan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan.

Sedangkan menurut temuan jurnal dari Purba (2023) menemukan bahwa jurnal dengan teori milik suchman 1997 bahwasanya program ini sudah berjalan dengan baik tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan seperti infrastruktur yang kurang memadai sehingga berdampak pada petani, nelayan serta akses menuju desa ini. Selain itu, program ini juga perlu adanya peningkatan kerjasama antar lintas sektor serta perlunya kesadaran masyarakat sendiri dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga berkualitas di Desa Tanjung Rejo. Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas mengenai implementasi Kampung Keluarga berkualitas tetapi terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan dimana terletak pada lokasi yang diteliti, teori yang digunakan, serta fokus penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan-perbedaan inilah yang akan menghasilkan data yang berbeda pula.

Salah satu kabupaten yang sudah menerapkan Program Kampung Keluarga Berkualitas ini adalah Kabupaten Magetan. Dimana Kabupaten Magetan saat ini telah memiliki 188 desa dari 18 Kecamatan yang termasuk dalam Kampung Keluarga berkualitas. Kabupaten Magetan akan menargetkan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKB Dan PPA) Kabupaten Magetan, menargetkan

bahwa Tahun 2024 sebanyak 235 desa atau kelurahan akan berstatus sebagai Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan target tersebut diharapkan pada tahun 2024 seluruh Desa di Kabupaten Magetan akan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Diskominfo, 2023). Pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan tidak lepas dari konteks lokal yang unik. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat, keberagaman budaya akan mempengaruhi implementasi program ini. Di Kabupaten Magetan sendiri perlu penyesuaian untuk pendekatan pelaksanaan program dengan kondisi setempat agar program ini dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Magetan menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam tingkat partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Program yang telah dicanangkan oleh BKKBN tersebut maka Kabupaten Magetan harus melaksanakan program Kampung Keluarga Berkualitas ini. Perbedaan tingkat sosial, ekonomi, pendidikan serta budaya di setiap daerah yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa output dari satu program yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda di setiap wilayah pelaksana program. Dimana kondisi saat ini menunjukkan bahwa dari 188 desa yang telah menjalankan program Kampung Keluarga Berkualitas mayoritas Desa masih berstatus dasar, yaitu dengan rincian 103 Desa terklasifikasi ditingkat Dasar, 24 Desa ditingkat Berkembang, 58 Desa ditingkat Mandiri dan hanya 50 Desa yang berada ditingkat Berkelanjutan.

Terdapat 50 Desa terklasifikasi berkelanjutan yang ada di Kabupaten Magetan. Dari 50 Desa tersebut diantaranya adalah Desa Bedagung dan Desa Topen. Dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas terdapat 4 indikator untuk menyatakan bahwa Desa pelaksana tersebut berkualitas yaitu, indikator Ibangga, rendahnya angka stunting, status IDM (Indeks Desa Membangun) dan jumlah keluarga miskin. Indikator pertama, Indeks Ibangga di Kabupaten Magetan sendiri indeks iBangganya berada di level siaga dengan capaian 58,55.

Pada level tersebut kabupaten Magetan belum memenuhi capaian iBangga yang telah ditetapkan. Indikator kedua, Jumlah keluarga miskin di Desa Bedagung dan Desa Tapen ini masih memiliki banyak keluarga yang termasuk dalam status keluarga sejahtera. Dimana di Desa Tapen terdapat 231 KK atau 29,5% dari jumlah KK sedangkan di Desa Bedagung terdapat 320 keluarga prasejahtera dari total 620 KK. Indikator ketiga, status Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2023 di Desa Tapen status IDM-nya adalah Maju sedangkan di Desa Bedagung sudah berstatus sebagai desa Mandiri. Indikator keempat, didasarkan pada angka stunting dimana pada tahun 2023 Desa Tapen tidak memiliki balita yang berstatus Stunting sedangkan di Desa Bedagung terdapat 31 balita yang berstatus stunting, dimana jumlah stunting ini masih sama dengan jumlah stunting di tahun 2022.

Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan 2 Desa pelaksana Program Kampung Keluarga Berkualitas dengan sama-sama berklasifikasi Berkelanjutan yaitu Desa Tapen dan Desa Bedagung dalam melaksanakan program Kampung Keluarga Berkualitas ini memiliki output yang berbeda-beda dilihat dari indikator keberhasilan Kampung KB. Dengan latar belakang yang ada tersebut, sehingga penting untuk memeriksa sejauhmana implementasi program ini. Maka dalam penelitian ini akan meneliti terkait bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kabupaten Magetan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah,

- a. Bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan di Desa Bedagung dan Desa Tapen Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu,

- a. Untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan Desa Bedagung dan Desa Tapen yang ada di Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memiliki nilai kegunaan yang dapat diterapkan dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan di bidang Ilmu Pemerintahan terkhususnya terhadap Implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan Desa Bedagung dan Tapen yang ada di Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Praktis atau Akademik

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Magetan khususnya Desa Bedagung dan Tapen.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca, sebagai rujukan penelitian selanjutnya. Serta dapat memberikan masukan terkait dengan implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di kabupaten magetan khususnya Desa Bedagung dan Desa Tapen.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah disebut juga dengan definisi konseptual merupakan hal yang digunakan untuk menerangkan mengenai makna atau istilah yang diteliti sesuai dengan kaidah kamus bahasa sehingga tidak terjadi salah penafsiran terkait permasalahan yang akan diteliti.

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan akan memberikan hasil yang diharapkan dan telah memberikan manfaat secara nyata untuk masyarakat yaitu dengan melibatkan berbagai sumber daya dan tindakan untuk mewujudkannya.

2. Kampung Keluarga Berkualitas

Kampung Keluarga Berkualitas adalah suatu satuan wilayah yang setingkat dengan desa dimana dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan penyelenggaraan pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun program yang dijalankan pada Kampung KB ini merupakan program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Program yang ada dalam Kampung Keluarga Berkualitas ini meliputi bina keluarga lansia, bina keluarga remaja, bina keluarga balita, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, PIK-R dan Rumah Dataku.

F. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Menurut Jenkins (1993) kebijakan publik merupakan suatu kesatuan keputusan yang saling terkait satu sama lain yang ditetapkan seorang ataupun sekelompok aktor politik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam kebijakan publik ini mencakup cara-cara seperti apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan serta mengatasi suatu situasi tetapi masih dalam batas kewenangan atas kekuasaan dari para aktor. Sedangkan menurut, Udoji (1981) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan serta memiliki sanksi yang mengarahkan pada tujuan yang dituju dimana akan diarahkan pada suatu masalah yang dapat mempengaruhi sebagian masyarakat (Sore, 2017).

Menurut Dye (1992) kebijakan publik merupakan apapun yang menjadi pilihan pemerintah atas apa yang akan dan tidak akan dilakukan yang menjadi sebuah upaya dalam mencapai sebuah tujuan negara. Dari melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu merupakan suatu kebijakan publik, hal ini dikarenakan dalam upaya pencapaian tujuan atas pilihan yang dipilih merupakan suatu langkah pemerintah ini memiliki dampak yang sama besarnya dalam melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Menurut teori ini dalam penentuan kebijakan publik pemerintah sebagai pihak yang akan menetapkan kebijakan-kebijakan publik dimana aktor-aktor kebijakan publik lainnya hanya dapat mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat dengan memperhatikan batas kewenangannya. Dalam proses kebijakan publik memiliki tahapan yang cukup panjang. Menurut teori ini tahapan-tahapan dalam menguraikan kebijakan terdiri mulai dari identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahapan terakhir adalah mengevaluasi kebijakan (Suwitri, 2008).

Kebijakan publik dikatakan berhasil apabila kebijakan atau produknya diterima, dalam pelaksanaannya kebijakan dapat memberdayakan, memandirikan rakyat serta dalam pelaksanaannya menjadi suatu realitas yang saling berkesinambungan. Untuk itu, dalam perencanaan kebijakan haruslah jelas atau terukur, relevan serta berkualitas. Untuk dapat mencapai kondisi tersebut selain dalam perencanaan kebijakan maka dalam pelaksanaan kebijakan harus efisien secara sumberdaya dan adil dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan (Nugroho, 2018).

Dalam Kebijakan Publik terdapat beberapa tahapan penting yaitu sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sosialisasi Kebijakan ini bermakna sebagai suatu proses untuk menyebarluaskan mengenai kebijakan yang telah dibuat. Dalam proses ini penting untuk dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat termasuk kelompok sasaran mengetahui dan paham mengenai arah kebijakan. Implementasi

Kebijakan, yaitu tahapan dimana suatu kebijakan mulai dilaksanakan setelah proses sosialisasi. Dalam tahapan ini keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan eksternal dan kondisi agen pelaksana. Evaluasi Kebijakan, pada tahapan ini merupakan proses penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Dari evaluasi ini dapat diketahui bahwa apakah suatu kebijakan tersebut sudah mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

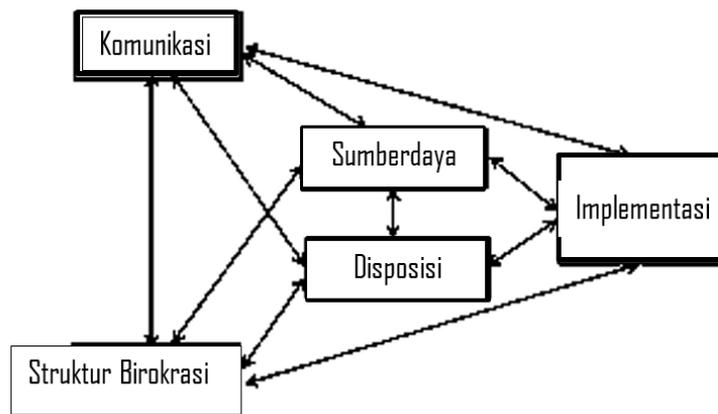
Sebuah kebijakan publik membutuhkan implementasi untuk mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Dimana implementasi ini merupakan suatu kegiatan atau proses untuk mengoperasikan sebuah program. Implementasi ini merupakan proses yang penting dari suatu kebijakan. Sehingga, implementasi kebijakan yang telah dirumuskan tersebut merupakan suatu pedoman maupun payung hukum untuk segera dilaksanakan baik secara administratif maupun nyata kepada masyarakat. Implementasi kebijakan public merupakan kegiatan yang bersifat interaktif, sehingga tidak bias terlepas dari faktor-faktor yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dalam implementasinya. Hoogwert (1983) dalam Tjilen (2019) bahwa untuk menunjang keberhasilan implementasi ini terdapat 3 unsur penting. Pertama, terdapat program yang dilaksanakan. Kedua, terdapat kelompok masyarakat yang akan disasar untuk menerima manfaat. Ketiga, adanya unsur pelaksana yang bertanggungjawab hingga pengawasan implementasi (Tjilen, 2019a)

Menurut Edward III Implementasi kebijakan merupakan sekumpulan tindakan yang mencakup penetapan dan pengimplementasian instruksi dengan memperhatikan banyak komponen seperti, kebijakn operasional, sumber daya, anggaran dan, perencanaan kegiatan, unit kerja, manfaat yang ingin diperoleh hingga partisipasi masyarakat dan aktor kepentingan. Dimana menurutnya bahwa kebijakan akan lebih efektif atau memberikan manfaat

nyata bagi masyarakat dalam pengimplementasiannya apabila kebijakan berasal dari level bawah daripada manajemen yang berasal dari level atas (Tjilen, 2019a).

George Edward III (1980) dalam Syahrudin (2019) dia menyatakan bahwa masalah utama dalam kebijakan public terletak pada kurangnya perhatian terhadap implementasi. Oleh karena hal itu, Edward III menyarankan bahwa dalam implementasi kebijakan untuk memperhatikan 4 isu pokok yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokasi.

Gambar 1. 1 Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber : Tjilen (2019)

Pertama, komunikasi, dimana implementasi yang efektif akan tercapai apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Dimana hal itu akan terlaksana apabila komunikasi berjalan dengan baik. Untuk mengukur Komunikasi dengan beberapa dimensi yaitu Transmisi, hal ini agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana saja tetapi juga disosialisasikan kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kejelasan, dimensi ini agar kebijakan yang telah ditransmisikan membuat pihak yang berkepentingan mengetahui dengan jelas maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan. dan Konsistensi, dalam

dimensi ini diperlukan agar kebijakan tidak simpang siur dan tidak membingungkan segala pihak yang berkepentingan.

Kedua, Sumberdaya menjadi hal penting dikarenakan jika Sumberdaya tidak memadai baik secara jumlah maupun kemampuan akan berakibat pada pelaksanaan program. Ada beberapa factor yang akan mempengaruhi sumberdaya agar berjalan dengan baik, yaitu Staf, dimana kegagalan yang sering terjadi disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi maupun tidak kompeten. Informasi, ini penting dalam pelaksanaan kebijakan yaitu dengan informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan dan informasi mengenai data pendukung kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Kewenangan, kewenangan disini berarti untuk menentukan bagaimana program dilakukan.

Ketiga, Disposisi yang merupakan sikap implementator. Dimana para pelaksana harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan sehingga tidak terjadi bias dalam prakteknya. Hal yang perlu diperhatikan dalam Disposisi ini adalah, pengangkatan birokrat, yaitu dengan memilih atau menunjuk orang dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan komitmen terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

Keempat, struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun suatu kebijakan tersedia sumberdaya serta pihak yang bertanggungjawab dan memiliki pemahaman akan kebijakan tersebut, kelemahan dalam birokrasi dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting dikarenakan kebijakan yang kompleks ini membutuhkan kerjasama banyak orang sehingga perlu adanya struktur birokrasi yang jelas. Sebagai pelaksana kebijakan perlu bagi organisasi atau birokrasi memiliki kemampuan untuk mendukung kebijakan dengan melalui koordinasi yang efektif dan lancar. (Syahrudin, 2019).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sudah di definisikan. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan Publik. Teori Implementasi kebijakan ini akan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kabupaten Magetan. Dimana implementasi sendiri berarti suatu proses atau kegiatan yang diharapkan dapat mencapai tujuan ataupun menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut teori Edward III ini berfokus terhadap 4 faktor yang dapat menggambarkan proses implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas Berkelanjutan di Desa Tapen dan Desa Bedagung Kabupaten Magetan.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah komunikasi yang terjadi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak, Petugas PLKB, Pemerintah Desa hingga ke Masyarakatnya mulai dari perencanaan pelaksanaan program. Untuk mengukur komunikasi ini menggunakan dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumberdaya

Sumberdaya dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas ini dimulai dari Sumber Daya Manusianya hingga sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya program, seperti Kader, masyarakatnya dan fasilitas kesehatan yang ada di Desa Bedagung dan Desa Tapen. Hal ini dengan memastikan Sumberdaya yang ada bekerja sesuai dengan kapasitasnya.

3. Disposisi

Disposisi berarti bagaimana langkah-langkah penyampaian kewenangan yang dilakukan yang dimulai dari DPPKBPPPA ke PLKB Kecamatan

Panekan dan Lembeyan hingga sampai ke Desa Pelaksana program yaitu, Desa Bedagung dan Tapen.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi disini berarti dalam implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas mendorong adanya struktur baru yang dibentuk. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat Kelompok Kerja baru mulai dari tingkat kabupaten dan ditingkat Desa Bedagung dan Desa Tapen Dimana para penyelenggara kebijakan ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan program.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa yang mendalam. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok yang berasal dari fenomena tersebut. Pendekatan kualitatif ini dipilih dikarenakan metode pendekatan ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena (Creswell, 2014).

2. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu obyek serta tempat dimana akan melaksanakan penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak Kampung Keluarga Berkualitas yang ada di Kecamatan Panekan dan Kecamatan Lembeyan. Kedua kecamatan ini dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan dalam pelaksanaan Kampung keluarga Berkualitas di Magetan ini terdapat perbedaan output antara Desa Bedagung dan mDesa Tapen walaupun memiliki klasifikasi yang sama yaitu, berkelanjutan. Untuk itu, kedua desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian yang akan dilakukan.

3. Teknik Penentuan Informan

Subjek penelitian atau disebut dengan informan merupakan orang yang memberikan suatu informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini subjeknya merupakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemerintah Desa pelaksana program. Teknik penentuan informan ini dengan menggabungkan 2 teknik yaitu *snowball* dan *purposive*. Penggabungan 2 teknik penentuan Informan ini dilakukan sebagai pertimbangan bahwa informan mengetahui dan terlibat langsung dalam proses implementasi Program Kampung Keluarga berkualitas serta dapat memberikan rekomendasi terkait informan lain yang terlibat.

Dalam penelitian ini ada informan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Informan ini dipilih dikarenakan DPPKB&PPA merupakan penanggung jawab program Kampung KB Di Kabupaten Magetan.
- b. Penyuluh Lapangan KB, informan ini dipilih karena PLKB adalah sebagai petugas lini lapangan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas. PLKB ini terdiri dari 2 kecamatan yaitu, Kecamatan Lembeyan dan Kecamatan Panekan.
- c. Pemerintah Desa, sebagai pelaksana program Kampung Keluarga Berkualitas. Adapun sesuai lokasi yang dipilih maka pemerintah desa disini yaitu, Pemerintah Desa Bedagung dan Tapen.
- d. Masyarakat, masyarakat desa yang melaksanakan program Kampung Keluarga berkualitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan guna mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau *interview* merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari informan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu peneliti sudah menyiapkan pertanyaan yang kemudian dapat dikembangkan pada saat proses wawancara sesuai dengan keadaan saat wawancara. Dimana peneliti akan memberikan pertanyaan terkait dengan fenomena yang diteliti.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik dengan menggunakan indra mata. Observasi digunakan untuk mengamati suasana yang ditujukan kepada hubungan fungsional dan social. Observasi ini dilakukan secara langsung ke Desa Bedagung dan Desa Tapen. Dengan melakukan observasi ini dapat diperoleh data yang tidak diungkapkan dalam proses wawancara.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, hingga video. Serta segala jenis dokumen yang ditemukan selama menggali data terkait dengan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data ini digunakan untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan data yang telah terkumpul, maka perlu dilakukannya pengecekan keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran dari hasil penelitian yang menekankan pada data atau informasi.

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik Triangulasi metodologi, triangulasi metodologi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk pengecekan sebagai pembandingan data dengan menggunakan sumber data dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi (Denzin, 1978).

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan yang akan melahirkan hasil dari sebuah penelitian. Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menganalisa dan menggambarkan berbagai kondisi situasi. Menurut (Miles *et.al*, 2014) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berisi mengenai data berupa kata-kata, foto, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data ini dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang menggunakan alat bantu, alat perekam dan alat pencatat. Proses pengumpulan data di awal harus melibatkan informan, aktivitas atau konteks terjadinya peristiwa tersebut.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan ataupun mengabstraksikan data-data yang telah diperoleh. Sehingga, didapatkan data mengenai fokus penelitian yang diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika penyusunan informasi. Penyajian data berisi penyajian grafik, bagan yang dirancang dalam bentuk praktis sehingga dapat memberikan gambaran atau kesimpulan yang dijustifikasikan ke analisis tahap berikutnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga ini adalah penarikan kesimpulan dari data verifikasi. Dimana dalam tahap ini peneliti bisa menyimpulkan temuan ini secara jelas. Sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

Gambar 1. 2 Analisis Data Interaktif

